

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI WILAYAH PERBATASAN POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) ARUK

Nur Indah Sari

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail: sarinurindah177@gmail.com

Oskar Hutagaluh

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail: oskarhutagaluh@unissas.ac.id

Desi Yuniarti

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail: desiyuniarti777@gmail.com

ABSTRACT

The development of national border areas is a strategic policy agenda aimed not only at strengthening defense and security but also at improving community welfare through local economic development. In this context, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role as drivers of economic activity in border regions, including the Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk in Sambas Regency. Despite the provision of supporting infrastructure such as border facilities, revitalized traditional markets, and non-Warehouse Receipt System (non-WRS) warehouses, MSMEs in the PLBN Aruk area continue to face significant challenges, including limited access to financing, weak integration into cross-border supply chains, and the underutilization of cross-border market opportunities. This study aims to formulate integrated and sustainable strategies for MSME development in the PLBN Aruk border area. The research employs a qualitative approach using a literature review method by analyzing policy documents, government reports, statistical data, and relevant academic publications. The findings indicate that effective MSME development in the PLBN Aruk area requires strong synergy between PLBN management, revitalized traditional markets, and the optimization of non-WRS warehouses as supporting distribution and logistics infrastructure. This integration is essential to strengthen MSME value chains, enhance competitiveness, and promote sustainable local economic growth in the border area of Sambas Regency.

Keywords: MSMEs, Border Area, PLBN Aruk.

ABSTRAK

Pembangunan kawasan perbatasan negara merupakan agenda strategis nasional yang diarahkan tidak hanya pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal. Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi di kawasan perbatasan, termasuk di wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas. Meskipun telah didukung oleh pembangunan infrastruktur perbatasan, revitalisasi pasar rakyat, dan pembangunan gudang non-Sistem Resi Gudang (non-SRG), UMKM di kawasan PLBN Aruk masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses pembiayaan, lemahnya integrasi rantai pasok, serta belum optimalnya pemanfaatan peluang pasar lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan UMKM di kawasan perbatasan PLBN Aruk secara terintegrasi dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan menganalisis dokumen kebijakan, laporan pemerintah, data statistik, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di kawasan PLBN Aruk memerlukan sinergi antara pengelolaan PLBN, revitalisasi pasar rakyat, dan optimalisasi gudang non-SRG sebagai infrastruktur distribusi dan logistik. Strategi tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai nilai UMKM, meningkatkan daya saing, serta mendorong keberlanjutan ekonomi lokal di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas.

Kata Kunci: UMKM, Kawasan Perbatasan, PLBN Aruk.

PENDAHULUAN

Perkembangan kebijakan pembangunan menimbulkan adanya perubahan pembangunan di kawasan perbatasan darat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional menegaskan kawasan perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan prioritas utama adalah kesejahteraan masyarakat (Tiya et al., 2022). Kawasan perbatasan negara masih dikatakan sebagai kawasan yang tertinggal dan terisolir karena pembangunan yang lambat ditandai dengan kurangnya sarana-prasaranan, infrastruktur, kemiskinan, dan ketergantungan dengan negara tetangga. Pembangunan wilayah perbatasan merupakan salah satu agenda strategis dalam kebijakan pembangunan nasional Indonesia. Kawasan perbatasan negara bukan hanya sebagai kawasan pinggiran, namun sebagai kawasan yang menjadi garda terdepan negara dan simpul pertumbuhan ekonomi baru (BNPP-RI, 2025a).

Dalam teori pembangunan wilayah, UMKM memiliki fungsi strategis sebagai penggerak ekonomi lokal karena kemampuannya menyerap tenaga

kerja dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. UMKM menjadi kunci dalam penyerapan lebih dari 97% tenaga kerja dan sebagai penyumbang peningkatan PDRB di Indonesia sekitar 60%, sehingga UMKM dinyatakan sebagai faktor kunci pemulihan ekonomi, khususnya pada kawasan perbatasan negara (Dwi Ariani et al., 2024). Namun, UMKM di kawasan perbatasan masih memiliki berbagai hambatan seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, konektivitas pasar, dan akses pembiayaan. Hambatan ini menjadikan UMKM di kawasan perbatasan negara memiliki hambatan yang lebih kompleks apabila dibandingkan dengan wilayah non-perbatasan (Linkumkm, 2025). Dalam konteks ini, keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Indonesia mempunyai peran penting sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi lintas negara yang memanfaatkan UMKM sebagai pendorong kemajuan ekonomi (BNPP-RI, 2025). Salah satu PLBN Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia adalah PLBN Aruk di Kabupaten Sambas.

PLBN Aruk Kabupaten Sambas memiliki peran strategis sebagai jalur perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Berbagai aktivitas lintas batas yang dilakukan berpotensi melahirkan peluang ekonomi lokal khususnya bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas sebagai wilayah perbatasan memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sambas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan tulang punggung utama perekonomian Kabupaten Sambas yang berkontribusi secara konsisten terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) (Darmawan, 2025). Namun, kontribusi besar tersebut selamanya tidak selalu sejalan dengan peningkatan usaha masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil. Sebagian besar masyarakat yang berperan sebagai pelaku usaha di sektor tersebut adalah UMKM dengan skala usaha mikro, produktivitas rendah, dan keterbatasan pada akses pembiayaan (Nazla et al., 2025).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw, pemerintah melaksanakan program revitalisasi pasar rakyat dan pembangunan Sistem Resi Gudang (Non-SRG) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan negara. Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan revitalisasi pasar ini bertujuan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan, serta memberikan edukasi kepada pedagang pasar untuk meningkatkan daya saing terhadap toko modern (Suryakusumah, 2023). Pada tahun 2023, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meresmikan pasar rakyat dan Gudang non-SRG di Kabupaten Sambas. Pembangunan pasar rakyat dan gudang non-SRG difokuskan pada kawasan perbatasan negara khususnya Kabupaten Sambas dengan tujuan agar tidak tertinggal jauh dengan negara Malaysia (Sejahtera, 2024).

Secara konseptual, program ini sangat membantu, namun pada kenyataannya nasib UMKM di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas

masih mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang mendasar terletak pada keterbatasan modal yang dihadapi UMKM di wilayah perbatasan, kurangnya agunan, dan terbatasnya ketersediaan program pinjaman perbankan resmi. Selain itu, UMKM tidak terintegrasi dengan baik dalam rantai pasok lintas batas, sehingga peluang perdagangan melalui PLBN Aruk kurang dimanfaatkan (Agung & Lestari, 2025). Selanjutnya, adanya peningkatan biaya logistik karena lokasi yang terpencil dan berkurang di kawasan perbatasan menunjukkan bahwa UMKM belum mampu sepenuhnya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan negara Kabupaten Sambas (Sentia, 2025).

Berbagai penelitian terdahulu tentang UMKM di kawasan perbatasan umumnya hanya menyoroti hambatan usaha atau dampak pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian lokal. Namun, kajian yang secara khusus merumuskan strategi pengembangan UMKM berbasis karakteristik ekosistem PLBN sebagai pusat aktivitas perdagangan lintas negara masih terbatas. Seperti penelitian oleh Christiana, dkk yang hanya memfokuskan penelitian pada strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Sambas yang secara khusus tidak menampilkan PLBN Aruk sebagai objek kajiannya (Christiana et al., 2023). Selain itu, integrasi antara perspektif pembangunan wilayah, peningkatan daya saing UMKM, dan peluang pasar Indonesia-Malaysia dalam satu kerangka strategis belum banyak dibahas, khususnya pada konteks PLBN Aruk.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan UMKM di kawasan perbatasan PLBN Aruk secara terintegrasi dan berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kapasitas internal pelaku usaha, meliputi aspek produksi, manajerial, dan kelembagaan, tetapi juga menekankan pemanfaatan peluang pasar lintas batas, peningkatan daya saing dan visibilitas produk lokal, serta penguatan ekosistem ekonomi lokal yang saling terhubung antaraktor dan wilayah. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan empiris dalam pengembangan kajian ekonomi perbatasan, khususnya terkait dinamika UMKM di wilayah dengan karakteristik keterbatasan akses, ketergantungan pasar lintas negara, dan interaksi kebijakan multilevel. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan pengembangan UMKM yang lebih kontekstual, aplikatif, dan responsif terhadap kondisi spesifik wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Sambas, dengan PLBN Aruk sebagai titik strategis penggerak ekonomi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*) untuk menganalisis strategi pengembangan UMKM di kawasan perbatasan negara PLBN Aruk. Menurut Sugiyono, studi literatur merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur

ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Aziz, 2023). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh data yang komprehensif, akurat, dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Melalui metode studi literatur, penelitian ini bertujuan membangun landasan teoritis yang kuat sebagai dasar dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai model dan pendekatan dalam penelitian kualitatif. Penerapan studi literatur yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pengayaan referensi bagi penelitian selanjutnya (A'yun et al., 2025).

Pendekatan studi literatur dipilih karena memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengakses dan mengolah berbagai data sekunder yang relevan, meliputi dokumen resmi pemerintah, artikel jurnal ilmiah, laporan kementerian, serta publikasi dari laman daring yang kredibel. Data yang dianalisis mencakup kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta data statistik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sambas. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pengembangan UMKM di kawasan PLBN Aruk, dengan penekanan pada perumusan strategi revitalisasi pasar rakyat dan optimalisasi gudang non-SRG sebagai infrastruktur pendukung. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dan telaah terhadap dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan UMKM dan pembangunan kawasan perbatasan. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema utama penelitian, mengelompokkan kebijakan yang relevan, serta menganalisis implikasinya terhadap penguatan UMKM dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan PLBN Aruk.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PLBN Aruk Kabupaten Sambas

PLBN Aruk terletak di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, yang tepatnya berada di Desa Sebunga Dusun Aruk. PLBN Aruk terletak berdampingan dengan Pos Imegresen Biawak, Sarawak Malaysia. PLBN Aruk pertama kali beroperasi pada tanggal 11 Januari 2011 yang ditetapkan oleh pihak pemerintahan Kalimantan Barat dan Sarawak Malaysia. Fungsi utamanya adalah sebagai pintu *entry-exit* resmi bagi pelintas batas negara baik orang maupun barang, termasuk pelayanan terpadu imigrasi, bea cukai, serta karantina pertanian, kesehatan, dan perikanan (Deri et al., 2022). Pengembangan lanjutan PLBN Aruk diresmikan pada 17 Maret 2017 oleh Presiden Republik Indonesia sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang percepatan pembangunan PLBN terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan. (BNPP-RI, 2023).

Dari sisi fisik dan tata bangunan, PLBN Aruk dirancang tidak hanya untuk memenuhi fungsi administratif, tetapi juga mencerminkan identitas

budaya lokal. Konsep arsitektur bangunan utama mengadopsi unsur rumah adat Dayak, khususnya bentuk Rumah Panjang dan simbol Perisai, yang ditransformasikan ke dalam desain modern bangunan negara. Pendekatan ini menunjukkan upaya integrasi antara pembangunan infrastruktur strategis dengan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat perbatasan, sehingga PLBN Aruk tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pemeriksaan, tetapi juga sebagai representasi identitas wilayah perbatasan Indonesia (Lestari et al., 2020). Secara fungsional, PLBN Aruk berperan sebagai pusat pelayanan lintas batas yang terintegrasi, mencakup layanan keimigrasian, kepabeanan, serta karantina pertanian, perikanan, dan kesehatan bagi pelintas batas dari dan menuju Malaysia. Selain fungsi utama tersebut, kawasan PLBN Aruk juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang berada di zona penunjang, seperti pasar wisata, kios usaha, wisma Indonesia, layanan perbankan, rumah ibadah, dan sarana pelayanan publik lainnya. Keberadaan fasilitas penunjang ini dirancang untuk memperluas fungsi PLBN dari sekadar pintu perbatasan menjadi ruang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (BNPP-RI, 2023).

Sejumlah kajian dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberadaan PLBN Aruk memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar, terutama melalui peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, dan pariwisata perbatasan. Namun, dampak tersebut sangat bergantung pada sejauh mana PLBN mampu terintegrasi dengan ekosistem ekonomi lokal, termasuk UMKM, pasar rakyat, dan sistem logistik daerah. Dalam konteks ini, PLBN Aruk tidak hanya dipahami sebagai simpul administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang berpotensi mendorong pengembangan ekonomi lokal apabila didukung oleh kebijakan dan infrastruktur yang memadai (Sagita et al., 2024). Dengan demikian, gambaran umum PLBN Aruk menunjukkan bahwa pos lintas batas ini memiliki peran ganda, yaitu sebagai fasilitas pelayanan lintas negara dan sebagai katalisator pengembangan ekonomi kawasan perbatasan. Optimalisasi peran tersebut membutuhkan sinergi antara pengelolaan PLBN, pengembangan UMKM lokal, serta dukungan infrastruktur ekonomi seperti pasar rakyat dan gudang non-SRG agar manfaat pembangunan PLBN Aruk dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Kabupaten Sambas (Dedi & Nurfitra, 2024)

B. Kondisi UMKM PLBN Aruk Kabupaten Sambas

PLBN Aruk memiliki peran strategis dalam pengembangan UMKM di kawasan perbatasan negara yang menjadi ruang ekonomi produktif. Keberadaan PLBN Aruk dimanfaatkan sebagai instrumen stabilitas ekonomi melalui kebijakan operasi pasar murah untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat perbatasan. Kebijakan tersebut menunjukkan peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat perbatasan yang secara ekonomi relatif rentan (Ridho, 2025). Dalam konteks UMKM, stabilitas harga pada kebutuhan pokok menciptakan keadaan ekonomi

yang lebih kondusif bagi keberlangsungan UMKM yang sebagian besar bergantung pada konsumsi masyarakat lokal sehingga pengendalian inflasi secara tidak langsung dapat menciptakan kondisi usaha yang lebih teratur dan kondusif.

Selain berfungsi sebagai stabilitas ekonomi, PLBN Aruk juga menjadi ruang promosi dan akses pasar bagi para pelaku UMKM. Pada tahun 2022, pemerintah daerah telah mendorong pelaku UMKM untuk mengikuti pameran produk yang dilaksanakan di kawasan PLBN Aruk dengan tujuan untuk memperkenalkan produk lokal kepada pengunjung lintas negara, yaitu Malaysia. Pameran yang dilaksanakan ini berfungsi sebagai media promosi (Ridho, 2022). Dalam konteks pengembangan UMKM, pameran ini berfungsi sebagai media promosi, uji pasar, dan peningkatan visibilitas produk lokal. Informasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembangunan perbatasan, dari sekadar kawasan pengamanan negara menjadi ruang ekonomi produktif berbasis masyarakat lokal.

Peran PLBN Aruk dalam pengembangan UMKM juga diperkuat melalui integrasi adanya kebijakan pembangunan kawasan perbatasan negara yang menjadi prioritas nasional. PLBN Aruk diposisikan sebagai sebuah simpul pertumbuhan ekonomi yang menghubungkan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah Kabupaten Sambas menerapkan pendekatan *One Village One Product* (OVOP) yang menunjukkan Upaya sistematis dalam mengembangkan produk unggulan yang menjadi potensi lokal untuk menambahkan daya saing (Dedi, 2022). Namun, pengembangan produk unggulan tersebut memerlukan dukungan infrastruktur dan penyimpanan yang memadai. Dalam konteks ini, revitalisasi gudang non-Sistem Resi Gudang (non-SRG) di Kabupaten Sambas menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan produk UMKM, terutama komoditas pertanian dan pangan.

PLBN Aruk memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang berperan dalam meningkatkan kapasitas UMKM melalui pendampingan manajerial, akses pembiayaan, serta pemahaman regulasi perdagangan dan ekspor. Pendekatan ini mencerminkan strategi *capacity building* yang penting untuk mendorong UMKM agar mampu bersaing di pasar regional dan global (BNPP-RI, 2025). Namun, penguatan kapasitas usaha melalui PLUT dapat diintegrasikan dengan adanya keberadaan Gudang non-SRG di Kabupaten Sambas. Gudang non-SRG dapat berfungsi sebagai sarana logistik antara (*buffer stock*) bagi UMKM sebelum produk dipasarkan melalui pasar lokal, pasar wisata PLBN, maupun diekspor.

Dari perspektif ekonomi daerah, PLBN Aruk telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas perdagangan melalui penyediaan kios dan pasar wisata. Namun, manfaat ini akan lebih optimal apabila dihubungkan secara sistemik dengan pasar rakyat yang telah direvitalisasi serta gudang non-SRG sebagai penyangga distribusi. Oleh karena itu, UMKM di PLBN Aruk memerlukan adanya strategi pengembangan dengan

tujuan agar UMKM di PBLN Aruk mampu memiliki nilai tambah dan daya saing yang kuat.

C. Strategi Pengembangan UMKM di PLBN Aruk Kabupaten Sambas

Berdasarkan hasil analisis artikel dan laporan pemerintah daerah mengenai UMKM di PLBN Aruk yang dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas ekonomi perlu disinergikan dengan revitalisasi pasar rakyat serta optimalisasi gudang non-SRG sebagai infrastruktur pendukung distribusi dan logistik UMKM. Oleh karena itu, diperlukan perumusan strategi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada promosi dan akses pasar, tetapi juga memperkuat rantai nilai UMKM dari hulu hingga hilir.

Pertama, kebijakan yang menekankan kolaborasi PLBN Aruk dan pasar rakyat yang direvitalisasi mencerminkan kebutuhan akan kesinambungan pemasaran produk UMKM. Dari tahun 2022, pemanfaatan PLBN Aruk oleh UMKM hanya bersifat sementara, misalnya adanya pameran dan kegiatan yang bersifat sementara lainnya. Meskipun kegiatan ini mampu meningkatkan popularitas produk, namun pendekatan tersebut belum mampu menjamin keberlanjutan produk dalam jangka Panjang. Oleh karena itu, pasar rakyat yang telah direvitalisasi dapat dijadikan simpul distribusi utama yang dapat menyerap produksi UMKM secara rutin, sementara PLBN Aruk dapat dijadikan sebagai pintu depan akses pasar lintas negara. Strategi ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan UMKM yang hanya mengandalkan kegiatan-kegiatan atau event yang bersifat sementara saja.

Kedua, kebijakan revitalisasi Gudang non-SRG yang dapat berfungsi sebagai penyangga logistik yang dapat digunakan pelaku UMKM untuk menyimpan hasil produksi dalam jumlah dan kualitas yang lebih stabil. Dengan mayoritas masyarakat perbatasan yang berfokus pada pertanian dan perikanan, Gudang non-SRG ini sangat penting untuk digunakan karena komoditas pertanian dan perikanan sangat rentan terhadap fluktuasi produksi musiman. Apabila tidak ada dukungan Gudang non-SRG yang layak, maka UMKM akan terpaksa menjual produk dengan cepat dan harga yang rendah. Oleh karena itu, strategi kebijakan ini bukan hanya sebagai penyediaan infrastruktur fisik, namun juga merupakan kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan usaha UMKM di kawasan perbatasan PLBN Aruk.

Ketiga, strategi penguatan kluster UMKM berbasis komoditas unggulan yang dinilai mampu memperkuat efisiensi dan daya saing pelaku usaha. Pada konteks kawasan perbatasan, kluster UMKM juga dapat memudahkan pemerintah dalam melakukan pendampingan, pengawasan mutu, dan pengembangan produk unggulan di daerah Kabupaten Sambas. Strategi ini sejalan dengan pembangunan ekonomi daerah yang memfokuskan kegiatan ekonomi untuk menciptakan ekonomi kawasan perbatasan yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah. *Keempat*, sinkronisasi pendampingan UMKM dengan pembangunan infrastruktur

fisik. Pemerintah dapat melakukan pendampingan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan program pelatihan lainnya yang berfokus pada aspek manajemen dan kewirausahaan. Peningkatan kuantitas sumber daya manusia UMKM harus beriringan dengan pemanfaatan infrastruktur seperti pasar rakyat dan gudang non-SRG. Tanpa adanya dukungan infrastruktur yang memadai, peningkatan pelaku UMKM tidak akan berjalan dengan optimal.

Kelima, penguatan rantai nilai UMKM dari hulu ke hilir menjadi strategi pengembangan UMKM selanjutnya. Gudang non-SRG dapat menjadi sarana penyimpanan produk yang berfungsi sebagai saluran distribusi sebagai tahap hulu, sedangkan PLBN Aruk akan menjadi pintu hilir sebagai akses perdagangan lintas negara. Integrasi kedua nilai ini dapat menjadikan UMKM untuk semakin berkembang, pendekatan ini juga diharapkan mampu mengurangi risiko kegagalan UMKM akibat adanya lonjakan permintaan. *Keenam*, harus adanya koordinasi kelembagaan yang kuat. Kelembagaan yang kuat dapat menjadi penghubung kebijakan pusat dan daerah, sekaligus dapat menjadi pengawas, dan evaluasi pengembangan UMKM. Penguatan lembaga ini merupakan kerja sama dari berbagai lembaga, misalnya dari lembaga keamanan (TNI & Polri), pemerintah setempat (RT, RW, Kecamatan), pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi), serta pemerintah pusat (negara). Sehingga, Ketika kelembagaan sudah kuat maka dapat mencegah terjadinya tumpang tindih program dan kebijakan yang telah dibuat.

Berdasarkan strategi pengembangan UMKM yang telah diuraikan, diperlukan perumusan yang lebih sistematis dengan tujuan agar arah kebijakan dapat dipahami secara komprehensif. Oleh karena itu, strategi-strategi tersebut dirangkum dalam bentuk tabel untuk memudahkan pembacaan, perbandingan, serta implementasi kebijakan pengembangan UMKM di kawasan PLBN Aruk yang terintegrasi dengan revitalisasi pasar dan gudang non-SRG. Berikut ini adalah tabel penyajian arah kebijakan pengembangan UMKM di PLBN Aruk berbasis revitalisasi pasar dan gudang non-SRG sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Kabupaten Sambas:

Tabel 1
(Strategi Pengembangan UMKM di PLBN Aruk Kabupaten Sambas)

No.	Arah Kebijakan	Tujuan Kebijakan	Strategi Utama
1	Integrasi PLBN Aruk-Pasar Rakyat	Menciptakan kesinambungan pemasaran UMKM	Menghubungkan pasar rakyat hasil revitalisasi sebagai pusat distribusi dengan PLBN Aruk sebagai etalase dan pintu lintas negara
2	Revitalisasi Gudang	Menjaga kualitas	Optimalisasi gudang

	non-SRG	dan kontinuitas produk UMKM	non-SRG sebagai buffer stock dan pusat konsolidasi produk UMKM
3	Sinkronisasi Pendampingan UMKM	Meningkatkan kapasitas usaha secara terintegrasi	Pendampingan PLUT diselaraskan dengan pemanfaatan pasar dan gudang non-SRG
4	Penguatan Klaster UMKM	Meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM	Pembentukan klaster UMKM berbasis komoditas unggulan perbatasan dengan dukungan pasar dan gudang bersama
5	Penguatan Rantai Nilai UMKM	Mendorong UMKM naik kelas	Integrasi hulu-hilir: dimulai dari produksi → gudang non-SRG → pasar rakyat → PLBN Aruk
6	Pengelolaan Kelembagaan Terpadu	Menjamin keberlanjutan kebijakan UMKM	Pembentukan mekanisme koordinasi pengelolaan PLBN, pasar, dan gudang non-SRG

Berdasarkan tabel kebijakan tersebut yang disusun berdasarkan hasil analisis lanjutan menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di kawasan perbatasan negara memerlukan pendekatan yang menyelaraskan aspek produksi, distribusi, logistik, dan akses pasar. Kolaborasi antara PLBN Aruk, revitalisasi pasar rakyat, dan optimalisasi Gudang non-SRG menjadi sebuah kerangka yang strategis karena saling memperkuat rantai nilai UMKM Kabupaten Sambas.

Secara umum, penyusunan tabel kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM di kawasan perbatasan sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung, khususnya pasar rakyat dan gudang non-SRG. Tanpa dukungan sistem distribusi dan logistik yang memadai di tingkat daerah, PLBN Aruk akan sulit mengoptimalkan perannya sebagai penggerak aktivitas ekonomi perbatasan. Dengan demikian, sinergi kebijakan antara pengelolaan PLBN, revitalisasi pasar rakyat, dan optimalisasi gudang non-SRG menjadi landasan strategis dalam mendorong pertumbuhan UMKM Kabupaten Sambas yang berkelanjutan dan berdaya saing.

PENUTUP

Penguatan UMKM di kawasan perbatasan PLBN Aruk Kabupaten Sambas menuntut perumusan kebijakan yang bersifat menyeluruh dan berorientasi jangka panjang, mengingat posisi kawasan perbatasan tidak hanya sebagai wilayah terluar negara, tetapi juga sebagai ruang ekonomi strategis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan PLBN Aruk telah menciptakan peluang perdagangan lintas negara bagi UMKM, namun peluang tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan sistem distribusi, sarana logistik, dan akses pasar yang terintegrasi. Dalam konteks ini, revitalisasi pasar rakyat serta pemanfaatan gudang non-SRG berperan penting dalam memperkuat struktur rantai nilai UMKM, terutama dalam menjaga stabilitas pasokan dan mutu produk. Oleh karena itu, keterpaduan antara pengelolaan PLBN Aruk, pengembangan pasar rakyat, optimalisasi gudang non-SRG, pendampingan usaha, dan penguatan kelembagaan menjadi faktor penentu dalam meningkatkan daya saing serta keberlanjutan UMKM di Kabupaten Sambas.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, S. Q., Habsy, B. A., & Nursalim, M. (2025). Model-Model Penelitian Kualitatif: Literature Review. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(2), 342.
<https://jpion.org/index.php/jpi/article/view/367/244>
- Agung, G., & Lestari, K. (2025). Tantangan Akses Pembiayaan Umkm Terhadap Lembaga Keuangan Formal Di Indonesia. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(2), 3. <https://ejournal.nlc-education.or.id/>
- Aziz, Y. A. (2023). *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode*. Deepublish Store. https://deepublishstore.com/blog/penelitian-skripsi/studi-pustaka/?srsltid=AfmBOor_NrwfyLn2fkAwTmoINUOsMm34LTg-Ajh4gH2N61hie1QxnqJM, diakses tanggal 23 Februari 2026.
- BNPP-RI. (2023). *Mengenal PLBN Aruk di Perbatasan RI-Malaysia*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). <https://bnpp.go.id/berita/mengenal-plbn-aruk-di-perbatasan-ri-malaysia>, diakses tanggal 23 Februari 2026.
- BNPP-RI. (2025a). *BNPP RI Gelar Rakorendal 2025: Wujudkan Kawasan Perbatasan yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). <https://bnpp.go.id/berita/bnpp-ri-gelar-rakorendal-2025-wujudkan-kawasan-perbatasan-yang-tangguh-mandiri-dan-sejahtera>, diakses tanggal 23 Februari 2026.
- Christiana, M., Kalis, I., Hendri, M. I., & Safitri, H. (2023). Local Wisdom-Based MSME Development Strategy in Supporting Regional Economy Post Covid-19 Pandemic (Case Study in Sambas Regency). *Journal Management*, 22(2), 230.
<https://journal.binadarma.ac.id/index.php/mbia/article/view/2384>

- Darmawan, A. D. (2025). *PDRB ADHB di Kabupaten Sambas Menurut Sektor pada 2024*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/a27843cc48c7dba/sektor-utama-penggerak-perekonomian-di-kabupaten-sambas-pada-2024>, diakses tanggal 23 Februari 2026.
- Dedi. (2022). *Program Super Prioritas Dan UMKM Perbatasan Di Kabupaten Sambas*. ANTARA News Kalimantan Barat. <https://kalbar.antaranews.com/berita/527033/program-super-prioritas-dan-umkm-perbatasan-di-kabupaten-sambas>, diakses tanggal 23 Februari 2026.
- Dedi, & Nurfitra, T. (2024). *PLBN di Kalimantan Barat: Bagaimana pos lintas batas meningkatkan perekonomian lokal*. ANTARA News. <https://en.antaranews.com/news/304677/plbns-in-west-kalimantan-how-cross-border-posts-boost-local-economies?>, diakses tanggal 23 Februari 2026.
- Deri, P., Rekayas, F., & Chairunnissa. (2022). Identifikasi Kondisi Terkini Plbn Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. *JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan , PWK , Sipil, Dan Tambang*, 9(1), 2. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JMHMS/article/view/52353%0Ahttps://jurnal.untan.ac.id/index.php/JMHMS/article/viewFile/52353/75676592081>
- Dwi Ariani, A., Zouly, D., Cahyono, I., & Azizah, R. N. (2024). Pemberdayaan UMKM sebagai Strategi Pemerintah untuk Mengurangi Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020-2023. *Journal of Economics and Social Sciences*, 3(2), 92. <https://journal.civiliza.org/index.php/jess>
- Lestari, L., Muazir, S., Alhamdani, M. R., & Nurhamsyah, M. (2020). Karakter Fisik Bangunan di Daerah Perbatasan Antar Negara, Studi Kasus: Aruk, Kalimantan Barat. *Arsitektura*, 18(2), 176. <https://doi.org/10.20961/arst.v18i2.41976>
- Linkumkm. (2025). *Bagaimana Keterbatasan Infrastruktur Mempengaruhi UMKM di Daerah*. Linkumkm.Id. <https://linkumkm.id/news/detail/17027/bagaimana-keterbatasan-infrastruktur-mempengaruhi-umkm-di-daerah>, diakses tanggal 23 Februari 2026.
- Nazla, U., Putri, A., Rizki, N., & Regina, L. (2025). Pemberdayaan dan Strategi Pemasaran UMKM Berdaya Saing melalui Inovasi Pasca Pembangunan Jembatan di Wilayah Perbatasan Sambas. *Manajemen Business Innovation Conference-MBIC*, 8(8), 244. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/MBIC/index>
- Ridho, M. (2022). *Bupati Dorong Pelaku UMKM Tembus Pasar Ekspor di PLBN Aruk*. Sambas Times. <https://sambastimes.com/bupati-dorong-pelaku-umkm-tembus-pasar-ekspor-di-plbn-aruk/>, diakses tanggal 23 Februari 2026.
- Ridho, M. (2025). *Operasi Pasar Murah di PLBN Aruk Langkah Pemda Sambas Tekan Inflasi*. Sambas Times.

- <https://sambastimes.com/operasi-pasar-murah-di-plbn-aruk-langkah-pemda-sambas-tekan-inflasi/>, diakses tanggal 23 Februari 2026.
- Sagita, A. R., Hadiwijoyo, S. S., & Hergianasari, P. (2024). Plbn Aruk dan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Sambas dalam Perspektif Geoekonomi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(1), 162. <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i1.2936>
- Sejahtera, P. M. M. B. (2024). *Komitmen Percepat Pembangunan Kawasan Perbatasan, Mendag Zulhas Resmikan 5 Pasar Rakyat dan Gudang Non-SRG di Kabupaten Sambas*. Asumsi. <https://asumsi.co/post/87184/komitmen-percepat-pembangunan-kawasan-perbatasan-mendag-zulhas-resmikan-5-pasar-rakyat-dan-gudang-non-srg-di-kabupaten-sambas/>, diakses tanggal 23 Februari 2026.
- Sentia, A. (2025). *UMKM Perbatasan Sulit Akses Modal, Bertolak Belakang dengan Stimulus Janji Rp200 Triliun*. Insidepontianak. <https://insidepontianak.com/ekonomi/38999/umkm-perbatasan-sulit-akses-modal-bertolak-belakang-dengan-janji-stimulus-rp200-triliun>, diakses tanggal 23 Februari 2026.
- Suryakusumah, I. (2023). *Mendag Zulhas Resmikan Lima Pasar Rakyat dan Gudang Non-SRG di Sambas Kalbar*. Inilahjateng. <https://inilahjateng.com/foto-mendag-zulhas-resmikan-lima-pasar-rakyat-dan-gudang-non-srg-di-sambas-kalbar/>, diakses tanggal 23 Februari 2026.
- Tiya, S., Yuniarti, E., & Pratiwi, N. N. (2022). Strategi Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau Sebagai Simpul Pengembangan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kapuas Hulu. *JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, Dan Tambang*, 6(2), 2. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JMHMS/article/download/35249/75676582708>